

RINGKASAN

Rudy Yudha Penegakan Sanksi Pidana Bagi Pengguna Alat Tangkap Ikan Ilegal
Prawira (Studi Kasus Wilayah Hukum Banda Aceh)
217410102043

(Dr. Muhammad Nasir, S.H., LL.M and Dr. Faisal, S.Ag, S.H., M.Hum)

Nelayan atau penangkap ikan di wilayah hukum perairan laut Indonesia dilarang menggunakan jenis alat penangkap ikan ilegal yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan. Alat penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan termasuk diantaranya jaring trawl atau pukat harimau, dan compressor yang penggunaannya melanggar Pasal 9 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Nelayan di wilayah perairan laut Banda Aceh masih melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan ilegal yaitu menggunakan jaring trawl atau pukat harimau, dan melakukan penangkapan ikan dengan jaring *gillnet* dan kompressor.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penegakan hukum bagi pengguna alat tangkap ikan ilegal di wilayah hukum Banda Aceh, untuk menganalisis penyebab banyak pengguna alat tangkap ikan ilegal di wilayah laut hukum Banda Aceh, dan menganalisis upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap pengguna alat tangkap ikan ilegal di wilayah hukum Banda Aceh.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik penelitian lapangan (*field research*). Analisis data dilakukan secara deduktif, deskriptif analitik, dan preskriptif

Hasil penelitian didapatkan penegakan hukum terhadap pelaku pengguna alat tangkap ikan ilegal di Banda Aceh masih terdapat kekurangan dalam penjatuhan sanksi hukuman yang terdapat dalam Pasal 85 Undang-Undang Perikanan, dimana sanksi pidana yang dijatuhkan terlalu ringan dibandingkan dengan hukuman maksimal yang terdapat dalam Pasal 85 Undang-Undang Perikanan sehingga mengakibatkan para pelaku pengguna alat tangkap ikan ilegal di wilayah hukum Banda Aceh tidak jera dan tidak takut akan penegakan hukuman yang ringan tersebut, dan membuat kembali adanya pelaku yang berani mengulangi tindak pidana menggunakan alat tangkap ikan ilegal di wilayah hukum Banda Aceh. Penyebab masih banyak pengguna alat tangkap ikan ilegal di wilayah laut Banda Aceh dipengaruhi beberapa faktor antara lain tidak takutnya pelaku akan sanksi pidana yang dijatuhkan, terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan, terbatasnya dana oprasional pengawasan. upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap pengguna alat tangkap ikan ilegal di wilayah laut Banda Aceh dilakukan dengan upaya pre-emptif, preventif dan represif.

Disarankan agar penegakan hukum terhadap pelaku dijatuhi sanksi pidana yang berat, sehingga membuat takut pelaku mengulangi tindak pidana perikanan lagi. Disarankan agar pemerintah menambah biaya operasional untuk pengawasan Polisi Air Banda Aceh. Disarankan agar aparat penegak hukum lebih sering lagi dalam melakukan patroli pada laut Banda Aceh.

SUMMARY

Rudy Yudha *Enforcement of Criminal Sanctions for Users of Illegal Fishing
Prawira Gear (Case Study of Banda Aceh Legal Area)*
217410102043

(Dr. Muhammad Nasir, S.H., LL.M and Dr. Faisal, S.Ag, S.H., M.Hum)

Fishermen or fish catchers in the jurisdiction of Indonesian marine waters are prohibited from using types of illegal fishing gear that disturb and damage the sustainability of fish resources. Fishing equipment that disrupts and damages the sustainability of fish resources includes trawl nets or tiger seines, and compressors whose use violates Article 9 of Law Number 45 of 2009 concerning Fisheries. Fishermen in the Banda Aceh sea area still catch fish using illegal fishing gear, namely using trawl nets or tiger seines, and fishing with gillnets and compressors.

The purpose of this research is to analyze law enforcement for users of illegal fishing gear in the Banda Aceh jurisdiction, to analyze the causes of many users of illegal fishing gear in the Banda Aceh jurisdiction, and to analyze prevention and control efforts against users of illegal fishing gear in Banda Aceh jurisdiction.

The type of research used in this thesis research is empirical juridical research with a case approach and a statutory approach. Data sources consist of primary data and secondary data. The data collection technique used is field research techniques. Data analysis was carried out deductively, analytically descriptively and prescriptively.

The research results showed that law enforcement against perpetrators who use illegal fishing gear in Banda Aceh still lacks in imposing the penalties contained in Article 85 of the Fisheries Law, where the criminal sanctions imposed are too light compared to the maximum punishment contained in Article 85 of the Law. The Fisheries Law has resulted in perpetrators using illegal fishing gear in the jurisdiction of Banda Aceh not being deterred and not afraid of the enforcement of these light sentences, and making it more likely that there will be perpetrators who dare to repeat criminal acts using illegal fishing gear in the jurisdiction of Banda Aceh. The reason why there are still many users of illegal fishing gear in the Banda Aceh sea area is influenced by several factors, including the perpetrators' lack of fear of criminal sanctions being imposed, limited monitoring facilities and infrastructure, and limited operational funds for monitoring. Prevention and control efforts against users of illegal fishing gear in the Banda Aceh sea area are carried out with pre-emptive, preventive and repressive efforts.

It is recommended that law enforcement against perpetrators be subject to heavy criminal sanctions, so as to make the perpetrators afraid of repeating fishing crimes again. It is recommended that the government increase operational costs for supervision of the Banda Aceh Water Police. It is recommended that law enforcement officers patrol the Banda Aceh sea more frequently.